

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan persepsi dalam menginterpretasikan judul, maka penyusun memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

#### 1. Upaya Pemberdayaan

Secara etimologis *upaya* adalah kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran, untuk mencapai suatu tujuan.<sup>1</sup>

Selain itu *upaya* merupakan suatu usaha untuk mencapai suatu hasil yang lebih baik dan maksimal dalam meningkatkan taraf hidup seseorang atau kelompok masyarakat.<sup>2</sup>

Sedangkan istilah pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata *daya* yang memperoleh awalan “pe-“ dan akhiran “-an” yang berarti mempunyai kemampuan dan kekuatan.<sup>3</sup>

Menurut pandangan Esrom Aritonang pemberdayaan merupakan usaha untuk mengembangkan kekuatan atau kemampuan (*daya*), potensi, sumber daya masyarakat agar membela dirinya sendiri.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Peter Salim dan Jenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991) hlm. 1691.

<sup>2</sup> W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depdikbud RI, cet. XII, 2000) hlm. 450.

<sup>3</sup> Peter Salim dan Jenny Salim, *op. cit.*, hlm. 23.

<sup>4</sup> Esrom Aritonang, *Pendampingan Komunitas Pedesaan* (Jakarta: Sekretariat Bina Desa/DHRRA, 2001) hlm. 8

Sedangkan istilah pemberdayaan menurut Heru Nugroho adalah suatu proses penyadaran akan potensi atau daya yang dimiliki untuk menjadi berdaya dan diaktualisasikan dengan partisipasi melalui pendampingan untuk menstransfer pengetahuan (*transfer of knowledge*).<sup>5</sup>

Adapun yang dimaksud dengan “upaya pemberdayaan” dalam skripsi ini adalah suatu usaha untuk menggali dan mengembangkan potensi supaya dapat mempertahankan dan membela harkat dan harga dirinya demi keadilan, kemandirian dan kesejahteraan sosial.

## 2. Tunanetra

Kata tunanetra berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti kekurangan atau tidak memiliki penglihatan.<sup>6</sup> Dalam otodidaktif kata tuna berarti rusak dan netra berarti mata. Jadi tunanetra berarti rusak mata atau penglihatan.<sup>7</sup>

Menurut Frans Harsana Sasraningrat bahwa tunanetra adalah kondisi dari penglihatan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi ini disebabkan karena kerusakan pada mata, syaraf mata atau bagian otak yang mengolah stimulus visual.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Heru Nurgoho, *Memunculkan Ide-ide Kritis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm. 44.

<sup>6</sup> Mustafa Matsum, *Pokok-pokok Bahasan Penataran Pendidikan Luar Biasa bagi Anak Tunanetra* (Jakarta: Proyek Pembinaan SLB, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981) hlm. 1.

<sup>7</sup> Syamsur Mochtar, *Otodidaktif Anak Tunanetra untuk SGPLB* (Depdikbud, 1984) hlm. 6.

<sup>8</sup> Frans Harsono Sasraningrat, *Metodik Khusus Tunanetra* (Yogyakarta: Federasi Kesejahteraan Tunanetra, 1981) hlm. 8.

Hallahan dan Kauffman menggolongkan tunanetra menjadi dua, yaitu buta total dan kurang penglihatan.<sup>9</sup>

Sedangkan tunanetra yang penyusun maksudkan dalam skripsi ini adalah para tunanetra yang berada di lokasi tempat penyusun mengadakan penelitian yaitu di Panti Sosial Bina Netra (PSBN) "SADEWA" yang mengalami kerusakan indra penglihatannya baik rusak total maupun yang masih memiliki sisa penglihatan.

### 3. Panti Sosial Bina Netra (PSBN) "Sadewa"

Panti Sosial Bina Netra (PSBN) "Sadewa" merupakan salah satu panti sosial di lingkungan Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan berada di jalan Parangtritis Km. 5 Sewon Bantul Yogyakarta. Panti Sosial Bina Netra (PSBN) ini juga merupakan unit pelaksana teknis Dinas yang berada di lingkungan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang menangani masalah rehabilitasi para tunanetra di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Sesuai dengan Perda No. 7 tahun 2002 Panti Sosial Bina Netra (PSBN) "Sadewa" merupakan salah satu unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Sosial Propinsi Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk membina dan mengentaskan tunanetra sehingga mampu melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari beberapa penegasan istilah di atas, maka yang dimaksud dengan judul **"Upaya Pemberdayaan Tunanetra oleh Panti Sosial Bina Netra**

---

<sup>9</sup> Ngadina, *Peranan Pembimbing Keterampilan terhadap Kemandirian Penyandang Tunanetra di Panti Sosial Bina Netra Yogyakarta* (Yogyakarta: Universitas PGRI, 2004) hlm. 15.

(PSBN) ‘Sadewa’ Bantul Yogyakarta” adalah penelitian tentang usaha untuk menggali dan mengembangkan kemampuan, potensi, dan kemandirian tunanetra agar dapat mempertahankan dan membela harkat, martabat dan harga-dirinya demi keadilan dan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Panti Sosial Bina Netra (PSBN) “Sadewa” Bantul Yogyakarta.

## B. Latar Belakang Masalah

Manusia yang mendapat predikat “penyandang cacat” selalu dipandang sebagai warga negara yang tidak produktif, tidak efektif dan tidak efisien serta manusia yang lemah, tergantung pada orang lain dan bermobilitas rendah. Dalam konsepsi pembangunan, mereka sering tidak digolongkan sebagai sumber daya manusia yang mempunyai arti penting bagi keberhasilan pembangunan. Penyandang cacat lalu diletakkan sebagai obyek dari program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dan dianggap pantas memperoleh bimbingan, pembinaan, pelayanan, dan santunan.

Dengan pandangan yang seperti itu, sulit bagi manusia yang berpredikat penyandang cacat untuk mendapatkan kepercayaan agar dapat berperan serta aktif, sebagai subjek, dalam proses pembangunan. Sulit juga bagi mereka untuk menentukan dan meraih harapan serta menikmati hasil pembangunan.

Di samping pola pikir yang telah terstruktur di benak masyarakat seperti tersebut di atas, juga terdapat kultur yang menempatkan penyandang cacat sebagai manusia yang tidak beruntung, lemah, menderita, memalukan dan bahkan sebagai wujud kutukan Tuhan, baik bagi mereka sendiri maupun keluarga. Dalam anggota keluarga, penyandang cacat mendapat perlakuan

diskriminatif yang bisa merintangi pertumbuhan fisik, perkembangan jiwa, dan sosialisasi, yang kemudian melemahkan segala potensi dan kemampuan penyandang cacat yang menjadi anggota keluarga tersebut. Akibatnya penyandang cacat akan tetap tergantung hidupnya pada anggota keluarga yang lain serta menjadi beban keluarga, masyarakat, dan negara.

Salah satu kelompok penyandang cacat tersebut adalah para tuna netra. Kecacatan yang terjadi pada penglihatan seseorang, dapat mempengaruhi aktivitasnya dan karena kecacatannya pula mereka menyandang masalah kesejahteraan sosial di berbagai aspek kehidupan baik kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Keadaan seperti ini sebenarnya justru akan lebih mempermudah proses penyisihan terhadap penyandang cacat dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Untuk itu perlu adanya usaha untuk menumbuhkan, memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik (potensi), mental (kepercayaan diri) dan sosial tunanetra agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi warga masyarakat yang produktif dan mandiri tanpa ada perbedaan antara manusia yang sempurna fisiknya dengan manusia yang kurang sempurna secara fisik.

Agama Islam tidak mengakui adanya perbedaan baik dari golongan, ras, suku, apalagi hanya karena perbedaan fisik yang kurang sempurna. Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, diciptakan dari zat yang sama, berupa tanah liat yang kemudian Allah SWT melengkapinya dengan akal dan budi. Bentuk fisik tidak menjadi penghalang bagi manusia untuk

maju dan berkembang, apalagi dalam hal untuk mendapatkan ridha dan karunia Allah SWT, karena yang membedakan mereka di sisi Allah SWT adalah ketakwaannya, dan keeksistensian tunanetra sangat diakui oleh agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam bisa hidup dengan siapa saja dan Islam memberikan konsep hidup yang damai.<sup>10</sup>

Tunanetra adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai hak sama untuk mengembangkan potensi dirinya supaya lebih berdaya dan mandiri serta mampu hidup lebih layak di tengah masyarakat. Di sisi lain tunanetra ingin menemukan identitas dirinya dan merubah pola pikir masyarakat yang selalu menganggap remeh mereka, bahwa sesungguhnya mereka mempunyai potensi, kemampuan dan keahlian yang tidak dimiliki oleh masyarakat normal yang dapat diberdayakan dan dikembangkan.<sup>11</sup>

Seperti disebutkan oleh Enik Ratna Widati, UU RI No. 4 Tahun 1997 tentang “Penyandang Cacat” dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat” sebenarnya sudah menempatkan kedudukan dan pemberdayaan tunanetra dalam semua aspek kehidupan dengan jelas, kongkrit dan positif.<sup>12</sup>

Usaha kesejahteraan bagi tunanetra merupakan usaha yang tak terpisahkan dari pembangunan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan

---

<sup>10</sup> Zainuddin, *Qaryah Tayyibiah sebagai Model Pengembangan Masyarakat*, Jurnal PMI Media Pemikiran Pengembangan Masyarakat (Yogyakarta: Vol. 1, No. 2, Maret 2004) hlm. 78.

<sup>11</sup> Rahmad Wahab, *Mengenal Anak Berkelainan*: (Yogyakarta: IKIP Yogyakarta, 1993) hlm. 3.

<sup>12</sup> Enik Ratna Widati, *Pemberdayaan Tunanetra oleh Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta di Bidang Dakwah* (Yogyakarta: UIN, 2003) hlm. 7.

Pancasila dan UUD 1945. Menurut UU No. 6 Tahun 1974 manusia yang sejahtera secara sosial adalah manusia yang memiliki tata kehidupan dan penghidupan sosial, baik materi maupun spiritual disertai rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir dan batin, yang pada akhirnya mampu memenuhi kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosialnya.<sup>13</sup>

Masalah kesejahteraan sosial merupakan masalah yang sangat kompleks dan pelaksanaannya dalam pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini adalah Departemen Sosial, khususnya yang berkaitan dengan masalah peningkatan taraf hidup dan kehidupan penyandang cacat.

Salah satu program Departemen Sosial adalah ingin mengurangi masalah sosial yang ada pada tunanetra yang belum bisa melaksanakan fungsi sosialnya. Adapun masalah sosial yang dimaksud adalah masalah serba kekurangan, kesulitan dalam hal pengetahuan baca dan tulis, merupakan suatu hambatan untuk peningkatan kesejahteraan sosial yang disandang oleh tunanetra.

Kesejahteraan sosial dalam kehidupan sehari-hari disebut juga pelayanan sosial yang pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu seseorang atau kelompok dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya.<sup>14</sup> Pelayanan sosial dalam arti luas mencakup ruang lingkup pembangunan kesejahteraan atau substansi pembangunan sosial.

---

<sup>13</sup> Sudarman Danim, *Transformasi Sumber Daya Manusia* (Bandung: Bumi Aksara, 1994), hlm. 7.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 30.

Untuk mengetahui hambatan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial khususnya masalah pelayanan sosial bagi tunanetra perlu adanya pengembangan melalui upaya pemberdayaan, seperti bimbingan, pembinaan, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan yang dimilikinya yang nantinya dapat mendukung kehidupan dirinya, keluarga dan masyarakat. Dengan kata lain pekerjaan yang dilakukan oleh tunanetra dapat menuju kepada kemandirian dan kesejahteraan sosial.

Panti Sosial Bina Netra (PSBN) “Sadewa” yang memiliki daya tampung 50 oran, merupakan salah satu panti sosial yang berupaya memberdayakan para tunanetra dengan berbagai latar belakang baik agama, sosial, ekonomi dan pendidikan.

Melihat pentingnya upaya pemberdayaan tunanetra agar mereka bisa setara sebagai warga, menjadi penting untuk meneliti upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh PSBN Sadewa ini.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, penelitian dalam skripsi ini akan difokuskan pada persoalan bagaimana upaya pemberdayaan terhadap tunanetra yang dilaksanakan di Panti Sosial Bina Netra (PSBN) “Sadewa” Bantul Yogyakarta?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan latar belakang di atas dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan

upaya pemberdayaan terhadap kemandirian dan kesejahteraan tunanetra yang dilakukan oleh Panti Sosial Bina Netra (PSBN) “Sadewa” Bantul Yogyakarta.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara teoritis**

Setidaknya akan ada dua kontribusi dari penelitian ini: Pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelaksanaan pemberdayaan tunanetra yang dilakukan oleh Panti Sosial ataupun Yayasan Sosial.

Dengan hasil penelitian lapangan ini, maka manfaat kedua, yang diharapkan, adalah untuk membandingkan teori-teori pemberdayaan dengan realisasi dan praktiknya di lapangan, khususnya dalam kasus pemberdayaan tunanetra yang dilakukan oleh PSBN Sadewa Bantul.

### **2. Secara praktis**

#### **a. Bagi mahasiswa**

Penelitian ini dapat dijadikan acuan data awal untuk mendapatkan data-data lainnya yang lebih komprehensif dalam pemilihan yang bergerak di bidang pemberdayaan tunanetra dan diharapkan bisa menambah dan memperkaya khazanah keilmuan.

#### **b. Bagi Panti Sosial Bina Netra (PSBN) “SADEWA”**

Diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan secara obyektif bagi Panti Sosial Bina Netra (PSBN) “Sadewa” untuk lebih menyempurnakan program pemberdayaan terhadap tunanetra supaya bisa hidup mandiri dan hidup layak di tengah masyarakat.

## F. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang pemberdayaan tunanetra sebenarnya memang bukan penelitian baru. Di lingkungan Fakultas Dakwah saja, penelitian semacam ini pernah dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Enik Ratna Widati (angkatan 1999) pernah menulis skripsi dengan judul “Pemberdayaan Tunanetra oleh Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta di bidang Dakwah”.

Penelitian Enik Ratna Widati mengkhususkan pemberdayaan di bidang dakwah meliputi rethorika dakwah, seni baca al-Qur’an, hafalan al-Qur’an dan hafalan Hadits yang tidak terlepas dari keberadaan yayasan tempat penelitiannya yang bernafaskan Islam dan pemberdayaan yang dilakukan juga bernilai Islami.

Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta ingin mencetak manusia (tunanetra) yang soleh dan sholekhah yang dapat berperan aktif ikut menyebarkan agama Islam, karena sejak tahun 1964 senantiasa melaksanakan kegiatan pemberdayaan dalam meningkatkan potensi di bidang dakwah.

Selain Enik Ratna Widati, ada juga mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta yang meneliti masalah yang berkaitan dengan tunanetra, yaitu Ngadina (NIM 00420044, angkatan 2000) dengan judul “Peranan Pembimbing Keterampilan terhadap Kemandirian Tunanetra di Panti Sosial Bina Netra Yogyakarta”, dan Mahasiswa STPMD “APMD” Jurusan Ilmu Sosiatri jenjang program S1 angkatan 1998 yang bernama Mukhotib Hidayat (NIM 01510980) juga meneliti tentang tunanetra dalam

skripsinya yang berjudul “Pendidikan dan Keterampilan untuk Kemandirian Penyandang Tunanetra Melalui Panti Sosial Bina Netra “Dharma Putra” Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah”.

Penelitian Ngadina bertujuan untuk mengetahui seberapa penting peranan pembimbing keterampilan terhadap kemandirian tunanetra di Panti Sosial Bina Netra Yogyakarta, dan hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa peranan pembimbing keterampilan di Panti Sosial Bina Netra Yogyakarta mempunyai arti yang sangat besar dalam mewujudkan kemandirian tunanetra, seperti tumbuhnya rasa percaya diri, dapat menghasilkan pendapatan sendiri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya sebagai warga negara.

Sedangkan penelitian Mukhotib Hidayat bertujuan untuk mengetahui kemandirian tunanetra setelah berada di Panti Sosial Bina Netra “Dharma Putra” dengan bekal pendidikan dan keterampilan. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pendidikan dan keterampilan merupakan faktor yang sangat mendukung terciptanya kemandirian tunanetra.

Setelah penyusun membaca hasil penelitian yang sudah dilakukan tersebut, bisa dikatakan bahwa perlu dilakukan penelitian-penelitian lebih lanjut untuk memperkaya hasil penelitian yang pernah ada.

Dari ketiga penelitian tersebut, penulis merasa perlu untuk melanjutkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Enik Ratna Widati karena tema yang sangat relevan dengan kompetensi jurusan tempat penulis belajar. Hanya saja, jika penelitian Enik Ratna Widati hanya terfokus pada bidang dakwah, penelitian ini akan terfokus pada *upaya pemberdayaan* itu sendiri. Demikian pula dalam hal

lokasi, penulis berusaha untuk menampilkan fakta pemberdayaan di tempat yang berbeda dengan yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya agar bisa memberikan kontribusi data yang lebih kaya kepada para peneliti selanjutnya.

## G. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan dalam wacana pengembangan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial.

McArdle mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut, orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut, sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan serta kemandirian untuk mengembangkan keahlian dan kemampuannya.<sup>15</sup> Proses ini dilakukan secara kumulatif supaya semakin banyak kemampuan yang dimiliki seseorang, maka akan semakin baik dan mudah dalam proses pemberdayaannya. Pemberdayaan meletakkan partisipasi aktif masyarakat ke dalam efektivitas, efisiensi dan sikap kemandirian.<sup>16</sup>

Pemberdayaan untuk konteks sekarang telah mengalami perkembangan makna, dan memikirkan pemberdayaan dalam konteks sosial, yaitu

---

<sup>15</sup> Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001) hlm. 3.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 48.

pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian pemberdayaan benar-benar diupayakan untuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan masyarakat terpinggirkan bisa berdaya baik secara sosial, ekonomi, budaya, politik maupun di bidang kehidupan yang lainnya.

Kammerman dan Kahn menjelaskan enam komponen atau substansi kesejahteraan sosial dalam arti yang luas<sup>17</sup>, yaitu : 1) pendidikan; 2) kesehatan; 3) pemeliharaan penghasilan (*income maintenance*); 4) pelayanan kerja; 5) perumahan; dan 6) pelayanan sosial personal (*personal social services*).

## 2. Upaya Pemberdayaan

Pada hakekatnya upaya pemberdayaan dapat dipandang sebagai depowerment dari sistem kekuasaan yang mutlak absolut, dan upaya pemberdayaan itu dibarengi oleh adanya power kelompok terhadap kelompok lainnya.

Weber mendefinisikan power sebagai kemampuan seseorang/individu/kelompok untuk mewujudkan keinginannya, meskipun harus menentang yang lainnya. Istilah pemberdayaan yang disamakan dengan power harus dinegosiasikan sebagai strategi untuk mengatakan reformasi sosial.<sup>18</sup>

Ada dua kecenderungan dalam upaya pemberdayaan,<sup>19</sup> yakni *pertama* pemberdayaan menekankan pada proses atau mengalihkan sebagian

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 65.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 43-44

kekuasaan, kekuatan dan kemampuan pada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi berdaya (*survival of the fittest*). Proses ini lebih dilengkapi dengan upaya pendampingan guna mendukung pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian. *Kedua* pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai pilihan hidupnya melalui komunikasi (dialog). Kecenderungan kedua ini dalam proses pengembangan idenya mengandung muatan pemikiran mengenai kemampuan individu untuk mengontrol lingkungan.

Menurut Ginanjar Kartasasmita upaya pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga jalan<sup>20</sup>, yaitu :

- a. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.

Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap masyarakat baik normal, ataupun cacat memiliki potensi yang dapat dikembangkan yang nantinya bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan.

- b. Memperkuat potensi (daya) yang dimiliki oleh masyarakat.

Artinya, dengan menciptakan suasana yang dapat mendukung terciptanya peningkatan taraf penduduk, derajat kesehatan, dan akses kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi dan lainnya.

- c. Pemberdayaan yang mengandung arti melindungi.

Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutup diri dari interaksi, tetapi melindungi di sini untuk mencegah terjadinya kesenjangan dimana

---

<sup>20</sup> Ginanjar Kartasasmita, *Pemberdayaan Rakyat* (Jakarta: CIDES, 1996) hlm. 159-160.

yang lemah semakin lemah dan yang kuat semakin kuat, atau untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

### 3. Model pemberdayaan

Jack Rothman menyusun dan merumuskan tiga model pemberdayaan masyarakat, yakni pengembangan lokal, perencanaan sosial, dan aksi sosial.<sup>21</sup>

#### a. Model pengembangan lokal

Model ini mensyaratkan bahwa perubahan dalam masyarakat bisa dilakukan secara optimal bila melibatkan partisipasi aktif dari semua masyarakat guna mencapai tujuan utamanya, yaitu memberdayakan potensi dan mengembangkan kemampuan masyarakat.

Menurut Rady A Gany dimensi kemandirian dalam model pengembangan lokal mencakup tiga aspek<sup>22</sup>, yakni *pertama*, *Community oriented*, yaitu pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan nyata yang didasari komunitas setempat. *Kedua*, *community based*, yaitu pemberdayaan didasarkan pada sumberdaya yang ada dalam masyarakat setempat, seperti SDM dan SDA. *Ketiga*, *community managed*, yaitu pemberdayaan yang melibatkan langsung masyarakat di semua kegiatan. Strategi dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan adalah usaha penciptaan dan pengembangan partisipasi yang lebih luas dari seluruh warga masyarakat.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 67-69.

<sup>22</sup> Rady A Gany, *Menyongsong Abad Baru dengan Pendekatan Pembangunan Berbasis Kemandirian Lokal* (Yogyakarta: LKiS, 2001) hlm. 116.

b. Model perencanaan sosial

Model ini menekankan pada proses pemecahan masalah secara teknis terhadap masalah sosial yang substantif. Tujuan utama yang ingin dicapai dari model ini adalah menciptakan, menyusun dan memberikan bantuan-bantuan, baik yang bersifat materi, maupun pelayanan yang berbentuk jasa dengan tujuan menciptakan kemampuan dan kecakapan masyarakat dalam memecahkan permasalahan melalui usaha-usaha yang terencana, terarah dan terkendali. Strategi dasar yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah mengumpulkan atau mengungkapkan fakta-fakta dan data mengenai suatu permasalahan.

c. Model aksi sosial

Model ini menekankan betapa pentingnya penanganan kelompok masyarakat untuk tidak beruntung secara terorganisasi, terarah dan sistematis. Tujuannya adalah mengadakan perubahan mendasar melalui pemerataan kekuasaan dan dasar kebijakan. Langkah yang ditempuh adalah memotivasi masyarakat untuk bersikap kritis dan akomodatif terhadap kebijakan.

Menurut Friedman pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif. Karena proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial, status hirarki, maka kemauan individu yang merasa senasib saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan paling efektif.

Di dalam kelompok akan terjadi suatu dialog vital encounter yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok.

Anggota kelompok menumbuhkan identitas seragam dan mengenali kepentingan bersama.<sup>23</sup>

#### 4. Tahapan Pemberdayaan

Berdasarkan tahapannya, ada 3 tingkatan pelaksanaan pemberdayaan yang harus dilakukan<sup>24</sup>, yaitu :

- a. Pengalaman positif dalam keluarga yang memberikan rasa percaya diri dan persaingan dalam interaksi sosial,
- b. Memaksa kemampuan mereka untuk mengatur kehidupan sosial dan menggunakan institusi sosial (sekolah) untuk memperoleh kompetensi.
- c. Mereka dapat menerima dan menampilkan nilai-nilai sosial.

Pemberdayaan masyarakat bukan berarti membuat masyarakat makin bergantung pada berbagai program pemberian, karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri dan hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain.

#### 5. Bentuk Pemberdayaan

Sebenarnya ada banyak bentuk pemberdayaan, tergantung pada masalah yang diberdayakan. Dalam penelitian Enik Ratna Widati, pemberdayaan di Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta menghususkan pada peningkatan potensi di bidang dakwah karena ingin mencetak tunanetra yang soleh dan sholihah yang dapat

---

<sup>23</sup> Vidyandika Moeljarto, *Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui Program IDT* (Jakarta: CSIS, 1996) hlm. 138.

<sup>24</sup> Harry Hikmat, *op. cit.*, hlm. 54.

berperan aktif ikut menyebarkan agama Islam. Bentuk pemberdayaannya meliputi bimbingan rethorika dakwah, seni baca Al-Qur'an, hafalan Al-Qur'an dan hafalan Hadits.

Sedangkan dalam penelitian Ngadina tidak membahas bentuk pemberdayaan, tetapi pada bentuk bimbingan. Dimana peranan pembimbing sangat penting dalam pembelajaran dibidang ketrampilan.

Dalam penelitian Mukhotib Hidayat tidak membahas tentang pemberdayaan, tetapi pada peran pendidikan dan keterampilan yang sangat mendukung kemandirian tunanetra.

Dari ketiga penelitian tersebut bentuk pemberdayaan yang dilakukan berbeda. Maka penyusun bisa membandingkan bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh tempat-tempat penelitian tersebut dengan tempat penelitian penyusun.

## **H. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh hasil yang sempurna dalam suatu penelitian ilmiah diperlukan metode yang mendukung. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Peneliti akan melakukan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif.

Adapun sistematika pembahasan analisa deskriptif kualitatif menurut Lincoln dan Guba ada tiga langkah dalam penulisan laporan adalah sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. Menyusun data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari wawancara, dokumentasi, maupun observasi, apabila data-data tersebut diperlukan, maka telah siap untuk digunakan.
- b. Menyusun kerangka laporan, hal-hal yang diperhatikan dalam penyusunan laporan adalah berusaha agar seluruh data tercakup dalam kerangka ini.
- c. Mengadakan uji silang dengan jalan menelaah indeks bahan data satu demi satu kemudian dipertanyakan apakah hal itu sesuai dengan kerangka.

## 2. Penentuan Subyek dan Obyek Penelitian

### a. Penentuan subyek penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di tempat terjadinya gejala-gejala.<sup>26</sup>

Secara teoritis yang dimaksud dengan subyek penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 227-228.

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980) hlm. 136.

<sup>27</sup> Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988) hlm. 135.

Untuk mendapatkan data yang obyektif dari suatu obyek penelitian yang diteliti, perlu adanya subyek penelitian di tempat penyusun mengadakan penelitian, yaitu di Panti Sosial Bina Netra (PSBN) "SADEWA". Yang menjadi subyek penelitian tersebut adalah :

- 1) Pimpinan dan karyawan/karyawati Panti Sosial Bina Netra (PSBN)
  - 2) Pengasuh
  - 3) Tunanetra.
- b. Penentuan obyek penelitian

Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah pengertian pemberdayaan, model pemberdayaan, upaya pemberdayaan, tahapan pemberdayaan dan bentuk pemberdayaan terhadap tunanetra yang dilakukan oleh Panti Sosial Bina Netra (PSBN) "Sadewa" Bantul Yogyakarta.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diharapkan dari penelitian ini, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) hlm. 135.

Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal, biasanya dilakukan dalam keadaan berhadapan, namun bisa melalui telepon.<sup>29</sup> Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.<sup>30</sup> Wawancara disebut juga dengan interview, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan yang menjadi sumber diinterview adalah pemimpin, karyawan karyawan, pengasuh dan tunanetra yang tinggal di asrama Panti Sosial Bina Netra (PSBN) "SADEWA" Bantul Yogyakarta.

Dengan teknik ini pewawancara (penyusun) mengajukan beberapa pertanyaan pada sumber informasi guna untuk mendapatkan informasi mengenai upaya pemberdayaan terhadap tunanetra di Panti Sosial Bina Netra (PSBN) "SADEWA" Bantul Yogyakarta.

b. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.<sup>31</sup> Menurut Suharsimi Arikunto, observasi adalah suatu metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki.

---

<sup>29</sup> Nasution, *op. cit*, hlm. 106.

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong, *op. cit*, hlm. 138.

<sup>31</sup> Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 129.

Metode observasi digunakan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki atau diteliti. Mengadakan observasi menurut kenyataan melukiskan dengan kata-kata secara cermat, dan tepat apa yang diamati, mencatatnya dan kemudian mengolahnya dalam rangka masalah yang diteliti secara ilmiah dan ini bukanlah pekerjaan yang mudah.<sup>32</sup> Metode ini penyusun gunakan untuk mengumpulkan data guna mengetahui gambaran umum mengenai Panti Sosial Bina Netra (PSBN) "SADEWA" Bantul Yogyakarta, selain itu juga untuk mengetahui upaya pemberdayaan yang dilakukan terhadap tunanetra.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang nyata dari obyek penelitian dengan mengambil sebagian atau yang telah tersedia. Dokumentasi bisa diartikan suatu metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau verbal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>33</sup>

Koentjaraningrat mengatakan : "Dokumentasi adalah sejumlah data yang tersedia yaitu data verbal seperti yang terdapat pada surat menyurat, catatan harian (jurnal), kenang-kenangan dan laporan-laporan".<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Nasution, *op. cit.*, hlm. 106.

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hlm. 206.

<sup>34</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1986) hlm. 63.

Dokumen juga digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan.<sup>35</sup>

Selain itu metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data yang tertulis dan digunakan untuk melengkapi dan mengecek data-data yang diperoleh dari interview dan observasi.

#### 4. Analisis data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk lain agar mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>36</sup> Dalam proses penganalisaan data yang akan penyusun gunakan dalam cara deskriptif kualitatif, maka analisis data yang penyusun gunakan adalah berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>37</sup>

Tujuan analisa adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dipahami dan dimengerti sebagaimana data-data yang diberikan oleh informan yang belum terbentuk kalimat disusun menjadi kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti.

Agar dalam menganalisa data dapat dilaksanakan dengan baik maka harus ada proses atau langkah-langkah. Menurut Lexy J. Moleong, proses analisa data ditandai dengan: *pertama* menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, *kedua* mengadakan reduksi data dengan jalan membuat

---

<sup>35</sup> Lexy J. Moleong, *op. cit*, hlm. 161.

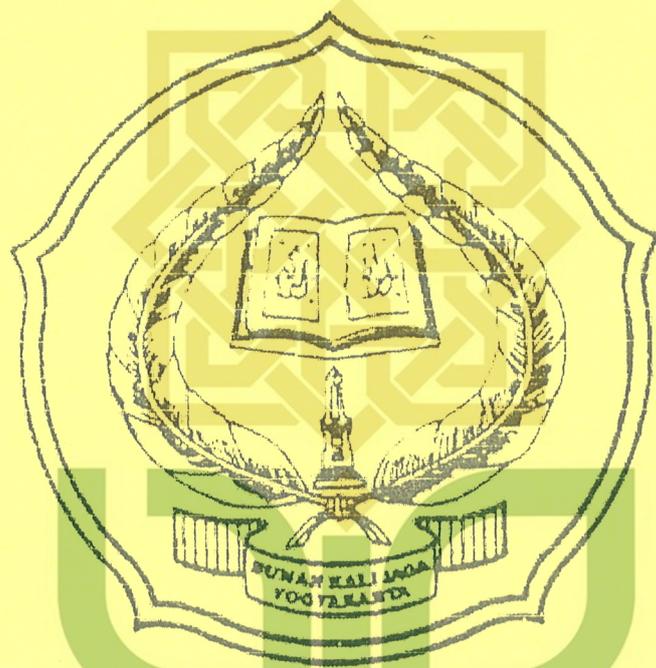
<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Melton Putra, 1992) hlm. 120.

<sup>37</sup> Lexy J. Moleong, *op. cit*, hlm. 3.

abstraksi. *Ketiga* menyusun dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada langkah-langkah selanjutnya. *Keempat* mengadakan pemeriksaan keabsahan data.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan hasil penelitian lapangan sesuai dengan judul skripsi “Upaya Pemberdayaan Tunanetra oleh Panti Sosial Bina Netra (PSBN) “Sadewa” Bantul Yogyakarta” penyusun mengemukakan beberapa hal yang terkait dalam upaya pemberdayaan.

Panti Sosial Bina Netra (PSBN) menerapkan konsep pemberdayaan yang sesuai dengan pendapat McArdle, yaitu ingin meningkatkan potensi, mengembangkan kemampuan, keahlian dan kemauan untuk bisa, menata hidupnya supaya mandiri dan sejahtera dengan melibatkan tunanetra dalam semua kegiatan melalui proses pemberdayaan di dalamnya terdapat proses pelayanan yang telah terstruktur secara teratur dan terarah.

Sedangkan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh PSBN itu sendiri sesuai dengan pendapat Ginanjar Kartasasmita yaitu, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang dengan memotivasi mereka untuk memperkuat potensi yang dimiliki dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya supaya mereka dapat merubah nasibnya sendiri, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Q.S. Ar Ra’ad ayat 11 yang menerangkan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali mereka merubahnya sendiri.

Dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh PSBN terdapat model pemberdayaan, tahapan pemberdayaan dan bentuk pemberdayaan. *Pertama* model pemberdayaan, dimana model pemberdayaan tersebut sesuai dengan yang dikonsepsikan oleh Jak Rathman yaitu model pengembangan lokal, perencanaan sosial dan aksi sosial. *Kedua* tahapan pemberdayaan, tahapan pemberdayaan yang dilakukan PSBN dalam upaya pemberdayaan sesuai dengan teori 3 tingkatan pelaksanaan pemberdayaan, yaitu pengalaman positif dalam keluarga yang sangat membantu dalam upaya pemberdayaan, memotivasi mereka untuk bisa mengatur kehidupannya dan memberikan kesempatan pada mereka untuk menerima dan menampilkan nilai-nilai sosial. *Ketiga* bentuk pemberdayaan, bentuk pemberdayaan sesuai dengan bentuk pemberdayaan yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang menjadikan tunanetra sebagai obyek yaitu berupa bimbingan dan pembinaan.

Dengan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh PSBN diharapkan tunanetra menjadi mandiri dan sejahtera.

#### **B. Saran-saran**

Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan, ada beberapa hal yang penyusun rasa kurang berkenan, antara lain :

- a. Bidang yang diberdayakan disamaratakan supaya tidak ada bidang yang mendominasi bidang yang lain.
- b. Perlu adanya fasilitas lain yang mendukung berjalannya kegiatan-kegiatan yang ada, seperti koran Braille, komputer Braille.

- c. Bagi pengasuh, pembimbing, dan pembina, diharapkan untuk lebih intensif lagi dalam memantau kegiatan anak asuh/tunanetra, supaya upaya pemberdayaan yang dilaksanakan bisa berhasil.
- d. Perlu adanya pendidikan formal, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial dalam bidang pendidikan.
- e. Memberikan reward pada anak asuh yang berprestasi.
- f. Perlu adanya pemantauan dan penyaluran anak asuh yang sudah lulus.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirul Hadi, dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Enik Ratna Widati, *Pemberdayaan Tunanetra oleh Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta di Bidang Dakwah*, Yogyakarta: UIN, 2003. Danim, Sudarwan, *Transformasi Sumber Daya Manusia*, Bandung: Bumi Aksara, 1994.
- Esrom Aritonang, *Pendampingan Komunitas Pedesaan*, Jakarta: Sekretariat Bina Desa/DHRRRA, 2001.
- Frans Harsono Sasraningrat, *Metodik Khusus Tunanetra*, Yogyakarta: Federasi Kesejahteraan Tunanetra, 1981.
- Ginangjar Kartasasmita, *Pemberdayaan Rakyat*, Jakarta: CIDES, 1996.
- Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama Press, 2001.
- Heru Nugroho, *Menumbuhkan Ide-ide Kritis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1986.
- Moleong J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. 16, 2002.
- Mukhotib Hidayat, *Pendidikan dan Keterampilan untuk Kemandirian Penyandang Tunanetra Melalui Panti Sosial Bina Netra "Dharma Putra" Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah* Skripsi. Yogyakarta: STPMD "APMD", 2002.
- Mustafa Matsum, *Pokok-pokok Bahasan Penataran Pendidikan Luar Biasa bagi Anak Tunanetra*, Jakarta: Proyek Pembinaan SLB, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981.
- Nasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, Bandung: Bumi Aksara, 2002.
- Ngadina, *Peranan Bimbingan Keterampilan terhadap Kemandirian Penyandang Tunanetra di Panti Sosial Bina Netra Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas PGRI, 2004.
- Rahmad Wahab, *Mengenal Anak Berkelainan*, Yogyakarta: IKIP Yogyakarta, 1993.

- Rady A Gany, *Menyongsong Abad Baru dengan Pendekatan Pembangunan Berbasis Kemandirian Lokal*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Salim, Peter dan Jenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Sudarman Danim, *Transformasi Sumber Daya Manusia*, Bandung: Bumi Aksara, 1994.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Melton Putra, 1992.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas UGM, 1980.
- Syamsur Mochtar, *Otodikdaktik Anak Tunanetra untuk SGPLB*, Dekdikbud, 1984.
- Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Vidyandika Moeljarto, *Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui Program IDT*, Jakarta: CSIS, 1996.
- Vidyandika Moeljarto, *Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui Program IDT*, Jakarta: CSIS, 1996.
- W.J.S., Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud RI, cet. XII, 2000.
- Zainuddin, *Qaryah Tayyibiah sebagai Model Pengembangan Masyarakat*, Jurnal PMI Media Pengembangan Masyarakat, Yogyakarta, Vol. 1, No. 2, Maret 2004.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA